



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**  
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

**TAHUN 2025**

**KANTOR GUBERNUR PAPUA**



# LAPORAN KINERJA

ALAMAT  
KOMPLEK KANTOR GUBERNUR (JLN. SOA SIU DOK II JAYAPURA)



[BPAPPROVINSIPAPUA24@GMAIL.COM](mailto:BPAPPROVINSIPAPUA24@GMAIL.COM)

[EKBANG.PAPUA.GO.ID](http://EKBANG.PAPUA.GO.ID)



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien berdampak dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,**

**Dr. ANDRY, S.IP., M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19740129 200012 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB .I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Struktur Organisasi .....	2
1. Bagian Kebijakan Perekonomian .....	3
2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam .....	3
3. Bagian Administrasi Pembanguana .....	3
B. Tugas dan Fungsi .....	3
C. Sumber Daya Aparatur .....	4
D. Sumber Daya Sarana Prasarana .....	5
E. Isu Strategis .....	6
<b>BAB. II.PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	9
<b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
1. Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian .....	11
2. Sasaran 2: Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan BUMD dan BLUD	

Yang Lebih Baik .....	14
3. Sasaran 3: Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan dan Rekomendasi Bidang SDA .....	16
4. Sasaran 4: Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah .....	26
B. Realisasi Anggaran .....	33
BAB.IV. PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	40
LAMPIRAN :	
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2025-2026	
2) Perjanjian Kinerja Kepala SKPDS Tahun 2025	
3) Jenis Penghargaan yang diterima/ diperoleh SKPD di Tahun 2025	

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Biro Perekonomian dan Admnistrasi Pembangunan 2025 .....	5
Tabel 1.2 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan .....	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 .....	8
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	10
Tabel 3.2 Sasaran 1 .....	11
Tabel 3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	14
Tabel 3.4 Sasaran 2 .....	15
Tabel 3.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	16
Tabel 3.6 Sasaran 3.....	16
Tabel 3.7 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telahdilakukan .....	26
Tabel 3.8 Sasaran 4.....	27
Tabel 3.9 Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	33
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	33
Tabel 3.11 Pelaksanaan Urusan PilihanBiro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi	
Pembangunan.....	2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang memiliki tugas pokok dan fungsi memfasilitasi urusan perekonomian dan administrasi pembangunan. Laporan ini disusun untuk melaporkan kinerja selama tahun 2025 khususnya dalam mengatasi masalah strategis.

Penyusunan LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja bersifat administratif dan akuntabilitas kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua

Adapun Isu Strategis (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi :

1. Penguatan Analisis Makro dan Mikro Ekonomi
2. Penerapan Prinsip GCG oleh BUMD
3. Belum Optimalnya Kinerja BLUD
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi SDA
5. Optimalisasi Capaian Target Realisasi Pembangunan, Pengolahan Data Realisasi Keuangan dan Fisik APBD/APBN
6. Struktur Organisasi belum optimal
7. Kuantitas dan Kompetensi SDM terbatas
8. Mekanisme pada Tugas dan Fungsi masih kurang

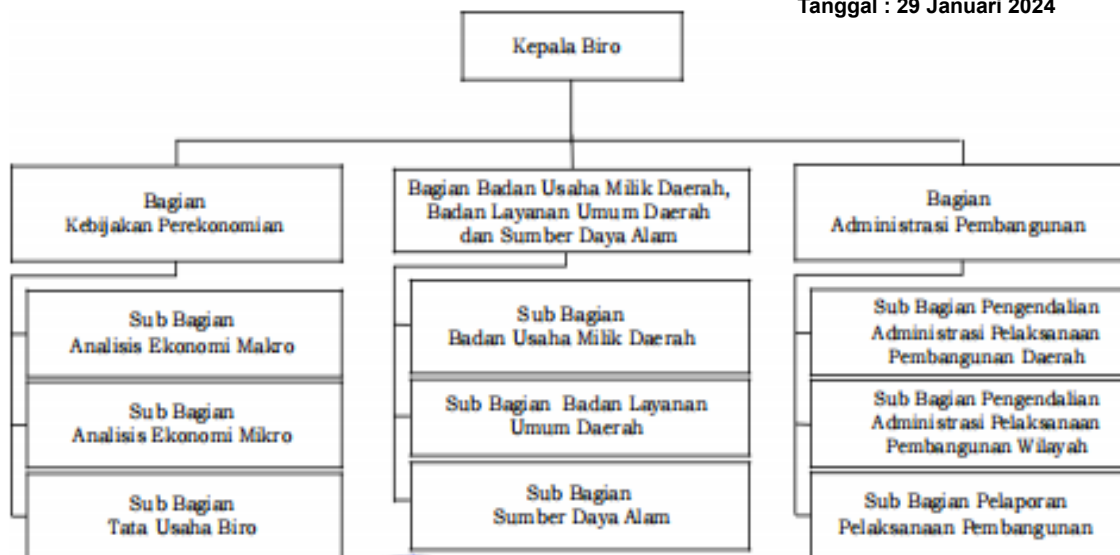
## A. Struktur Organisasi

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengemban tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dengan Struktur Organisasi seperti dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Lampiran IV Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 3 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Januari 2024



Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**SETDA**  
SOFIA BONAPIA, SH., M. Hum  
NRP. 19700912 199712 2 001

Pj. GUBERNUR PAPUA  
CAP/TTD  
Dr. M. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE.,MM

Sumber : Pergub Papua Nomor 3 Tahun 2024

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

**1. Bagian Kebijakan Perekonomian**

- a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
- b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

**2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Sumber Daya Alam**

- a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah; dan
- c. Sub Bagian Sumber Daya Alam

**3. Bagian Administrasi Pembangunan**

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

**B. Tugas dan Fungsi**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi Pembangunan Pembangunan daerah. Sedangkan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. perumusan program kerja di bidang perekonomian dan administrasi Pembangunan;
- 2. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi Pembangunan daerah;

3. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
4. pelaksanaan koordinasi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
5. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan daerah;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

### **C. Sumber Daya Aparatur**

Kondisi jumlah dan komposisi Pegawai pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Biro Perekonomian dan Administrasi**  
**Pembangunan Tahun 2025**

NO	JABATAN	KONDISI EKSISTING						JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI					L	P
			S3	S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	
B	Jabatan Administrator								
	1 Administrator	3		2	1			1	2
	2 Pengawas	8		5	3			5	3
	3 Pelaksana	41			10	1	30	20	21
C	Jabatan Fungsional								
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>26</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Biro PAP Desember 2024*

#### E. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian dan Administrasi**  
**Pembangunan**

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	5.2.02.05.01.0005	Meja Kantor 1/2 biro laci modera mod 122	Olimpic	2025	39.122.001
2	5.2.02.05.01.0005	Meja Rapat	Indahci	2025	6.999.999
3	5.2.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Highpoint	2025	54.000.000
4	5.2.02.05.03.0007	Lemari Arsip Pejabat	Importa	2025	25.685.400
5	5.2.02.05.01.0005	Layar Tripod Tri 2121 84"/210cm Brite	Sony	2025	6.289.636

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
6	5.2.02.05.01.0005	UPS 600 VA	Prolink	2025	7.424.414
7	5.2.02.10.01.0002	PC ALL IN LENOVO CORE i5	Lenovo	2025	201.300.000
8	5.2.02.10.01.0002	Laptop Lenovo Legion i7	Lenovo Legion	2025	161.836.500
9	5.2.02.10.02.0003	Hardisk Eksternal	Portable SSD 1 TB	2025	4.960.580
10	5.2.02.10.02.0003	Led Projektor	Sony VPL DX	2025	16.238.200
11	5.102.01.01.0024	Penghancur kertas	Japan Eba-Eba	2025	21.212.100
<b>JUMLAH</b>					<b>545.068.830</b>

Sumber : Data Aset Biro PAP, Tahun 2025

## F. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdapat 2 (dua) klasifikasi permasalahan yang di hadapi yaitu: Faktor internal dan Faktor external yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kebijakan, program, isu/program prioritas nasional dan daerah khususnya dalam bidang perekonomian dan Pembangunan, diantaranya :

Untuk Faktor External yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yaitu ;

1. Penyusunan Kebijakan Perekonomian secara khusus dalam stabilisasi harga dan pasokan untuk menjaga inflasi daerah.
2. Belum terlaksananya RUPS Tahunan seluruh BUMD Provinsi Papua untuk mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik/GCG (Good Corporate Governance).
3. Belum terciptanya kemandirian pengelolaan keuangan dalam penerapan BLUD.

4. Terbatasnya data SDA dan belum optimal koordinasi lintas SKPD pengelola SDA.
5. Belum optimalnya Implementasi penetapan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
6. Belum optimalnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.
7. Belum optimalnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satker/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yaitu :

1. Jabatan Struktural pada tingkat pejabat pengawas belum semua diisi.
2. Kualitas dan kompetensi SDM pelaksana belum memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan pengendalian pembangunan.
4. Belum memadainya peralatan pendukung untuk kelancaran tugas dan fungsi di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Papua sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	Formulasi :  $\frac{\text{Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Dibidang Perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Dibidang Perekonomian}} \times 100\%$ Keterangan : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk kebijakan terdiri : Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas.	100%	100%
2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	Formulasi :  $\frac{\text{Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik}}{\text{Total Jumlah BUMD dan BLUD}} \times 100\%$ Keterangan : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memfasilitasi penguatan tata Kelola yang baik BUMD dan BLUD melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
3	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, minitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Realisasi koordinasi penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan kebijakan daerah dibidang SDA}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk : Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas.</p>	100%	100%
4	Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	<p>Formulasi :</p> $\frac{\text{Jumlah Kebijakan}}{\text{Jumlah Rumusan Kebijakan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Untuk Kebijakan dimaksud diantaranya Pergub, Kepgub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas.</p>	100%	100%

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1.000.000.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.600.000.000
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 1.501.100.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.101.100.000</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan Gubernur Papua.

Capaian kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025, akan dijelaskan berdasarkan Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis.

#### 1) Sasaran 1 :

**Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan**

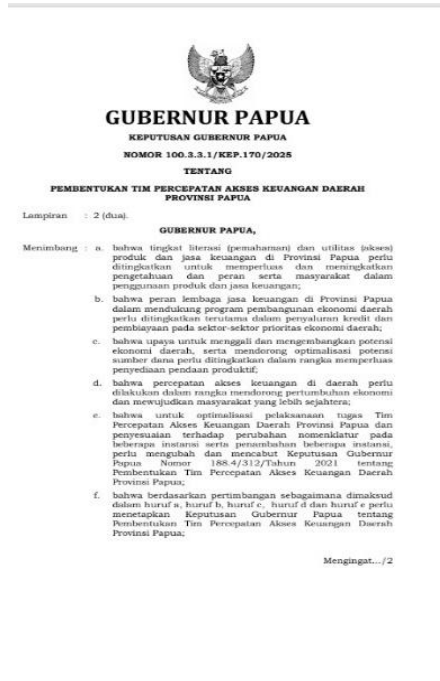
Sumber data perhitungan rumusan kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak 9 (Sembilan) dokumen yaitu :

- a) Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/Kep.170/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Papua
- b) Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.57/2025 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua
- c) Surat Edaran Gubernur Papua Tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2025 di Provinsi Papua
- d) Surat Edaran Gubernur Papua Tentang Pengendalian Inflasi Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H (Tahun 2025 M)
- e) Surat Gubernur Papua Hal Gerakan Pasar Murah pada HBKN Tahun 2025
- f) Surat Gubernur Papua Hal Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2025
- g) Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
- h) Usulan Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025-2029
- i) Evaluasi dan Rencana Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025

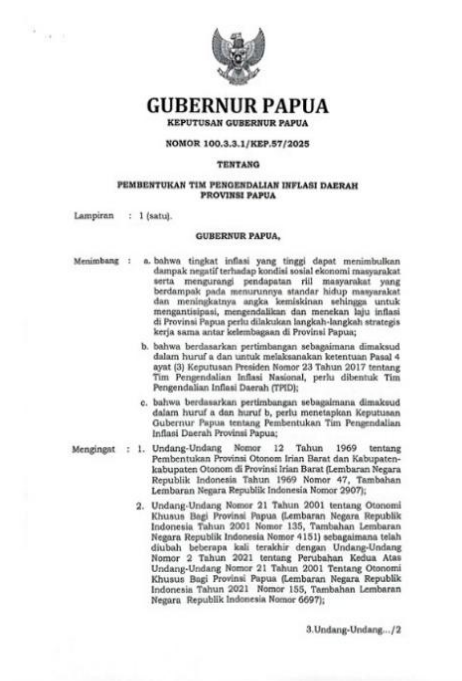
**Tabel 3.2**  
**Sasaran 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Presentase	Kode
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Presentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	

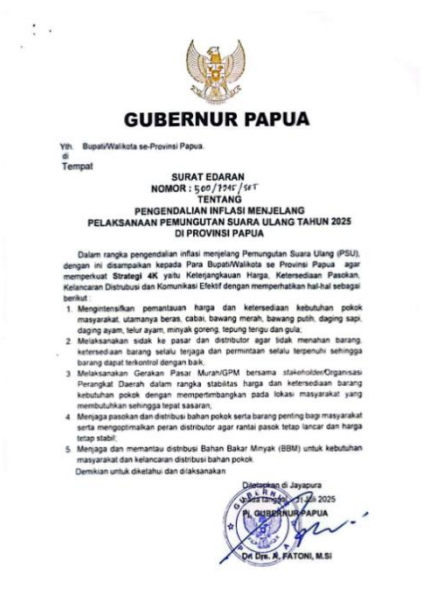
Dokumentasi/ evidence :



Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/Kep.170/2025  
Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses  
Keuangan Daerah Provinsi Papua



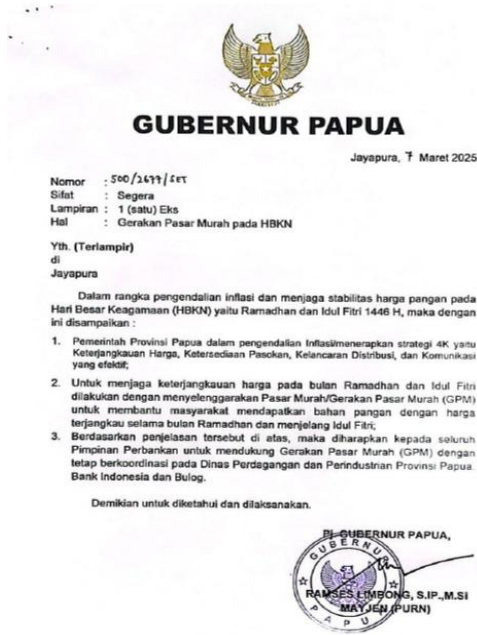
Keputusan Gubernur Papua Nomor  
100.3.3.1/KEP.57/2025 Tentang  
Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi  
Daerah Provinsi Papua



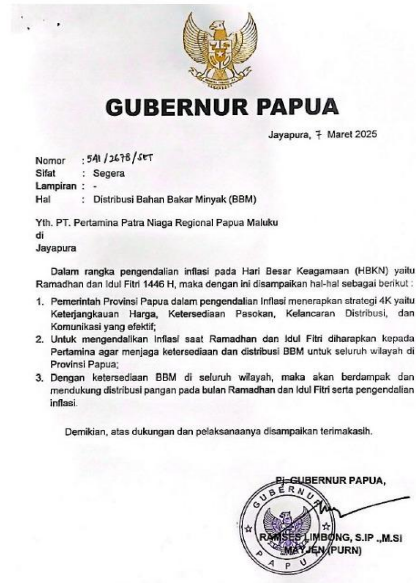
Surat Edaran Gubernur Papua Tentang  
Pengendalian Inflasi Menjelang  
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang  
Tahun 2025 di Provinsi Papua



Surat Edaran Gubernur Papua Tentang  
Pengendalian Inflasi Pada Bulan  
Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H (Tahun  
2025 M)



Surat Gubernur Papua Hal Gerakan Pasar Murah pada HBKN Tahun 2025



Surat Gubernur Papua Hal Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2025



Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tahun 2025



Usulan Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025-2029



Evaluasi dan Rencana Program Kerja TPAKD Provinsi Papua Tahun 2025



Surat Sekda Nomor 000.1.5/11401/SET  
Tanggal 06 Oktober 2025 Hal Undangan  
Rapat Penyusunan Profil Potensi  
Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi  
Papua

**Tabel 3.3**  
**Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi/Upaya yang Telah Dilakukan
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasilan dilakukan karena adanya inovasi-inovasi</li> <li>2. Perencanaan Program yang jelas dan terarah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar SKPD</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis, Pelatihan, Sosialisasi dan Evaluasi Program</li> <li>3. Dukungan Pimpinan dan Komitmen Organisasi.</li> </ol>

**2) Sasaran 2**

**Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA**

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu :

- a) Rapat Teknis Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penggunaan teknologi promosi potensi SDA melalui program RIRU
- b) Rapat Penyusunan Profil Potensi SDA dan Pembentukan Tim Penyusun Profil 06 Oktober 2025

Tabel 3.4  
Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Presentase	Kode
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Presentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	

Dokumentasi/ evidence :



Surat Sekda Nomor 000.1.5/9203/SET Tanggal 19 Agustus 2025 Hal Undangan Rapat Optimalisasi Potensi Perekonomian Bidang Sumber Daya Alam (SDA)

Rapat Penyusunan Profil Potensi SDA dan Pembentukan Tim Penyusun Profil 06 Oktober 2025



Rapat Teknis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan penggunaan teknologi promosi potensi SDA melalui program RIRU



**Tabel 3.5**  
**Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi/Upaya yang Telah Dilakukan
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Data potensi sumber daya alam (SDA) sudah terintegrasi dari SKPD pengelola SDA	Koordinasi antar SKPD pengelola SDA

**3) Sasaran 3 :**

**Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik**

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu :

- Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun Buku Perseroan (5 BUMD Provinsi Papua)
- Risalah Rapat RUPS Tahunan/ RUPS Luar Biasa (5 BUMD Provinsi Papua)
- Policy Brief (5 BUMD Provinsi Papua)
- Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD (RSUD Abepura)

**Tabel 3.6**  
**Sasaran 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Presentase	Kode
1	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Presentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	%	100%	100%	80%	80%	

Dokumentasi/ evidence :



## DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

Audiensi Dewan Komisaris dan Direksi



09 Maret 2025  
RUPS Bank Papua di Aula Lukmen



Rapat Bersama Komisaris dan Direksi Bank Papua  
04 September 2025



Rapat Evaluasi BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Papua  
20 Januari 2026

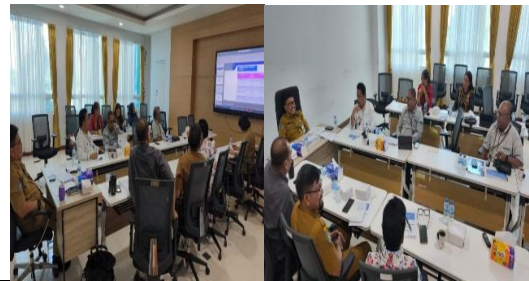
**DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. JAMKRIDA PAPUA**



PRA RUPS PT JAMKRIDA PAPUA  
02 JULI 2025



RUPS PT JAMKRIDA PAPUA 01



RAPAT EVALUASI BUMD PT JAMKRIDA  
PAPUA

**DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. IRIAN BHAKTI PAPUA (PERSERODA)**



Pra RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA  
tanggal 17 Juni 2025



RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA  
tanggal 16 JULI 2025



RAPAT EVALUASI BUMD PT IRIAN BHAKTI PAPUA  
tanggal 15 JANUARI 2026

**DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. IRIAN BHAKTI MANDIRI (HC)**



Rapat Pembinaan PT. IBM Tanggal 11 April 2025



Rapat Pembinaan asset anak-anak perusahaan PT. IBM Tanggal 15 Mei 2025



Pra RUPS PT IBM tanggal 4 Juli 2025



RUPS PT IBM tanggal 26 Agustus 2025



Rapat Evaluasi PT. IBM tgl 15 Desember 2025



Rapat Pembinaan BUMD PT. IBM tgl 25 November 2025

## DOKUMENTASI LAPORAN TAHUNAN PT. PAPUA DIVESTASI MANDIRI

15 JULI 2025

PRA RUPS PT. Papua Divestasi Mandiri



26 November 2025

RUPS PT. Papua Divestasi Mandiri



05 Januari 2026

Rapat Evaluasi PT. Papua Divestasi Mandiri



## DOKUMENTASI RUPS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

RUPS Bank Papua di Aula Lukmen



NOTARIS

**MARYATIE SIMANJUNTAK, SH**

Keputusan Menteri Kehakiman RI Tanggal 01 Februari 2024  
Nomor : AHU-00011-AH.02.03.TAHUN 2024

KOMPLEK RUKO ABEPURA MAS  
JL. RAYA ABEPURA, KOTA JAYAPURA  
TELP. 0812 4836 2214, 0812 4870 2819, 0812 4788 8517

Turunan / Salinan :

A K T A : RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
PAPUA

TANGGAL : 20 MARET 2025

NOMOR : 09.



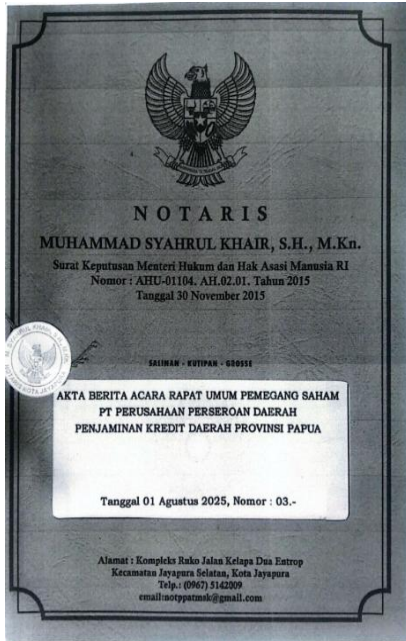
**POLICY BRIEF**

KEBIJAKAN PENGUATAN TATA KELOLA DAN KINERJA PT IRIAN BHAKTI  
PAPUA (PESEROGAN) SEBAGAI INSTRUMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN  
EKONOMI DAERAH PROVINSI PAPUA

Tim Analisis Investasi Papua Tahun 2025

Disusun Oleh  
Tim Analisis Investasi Provinsi Papua Tahun 2025

## DOKUMENTASI RUPS JAMKRIDA

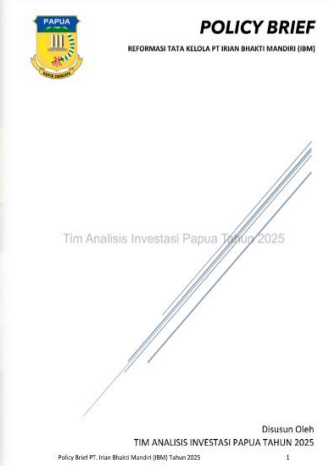


RUPS PT JAMKRIDA PAPUA

## DOKUMENTASI RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA



RUPS PT IRIAN BHAKTI PAPUA







**DOKUMENTASI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**Rapat Penerapan BLUD Provinsi Papua**

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Soe Sili, Dok II, Kantor Gubernur Papua, Jayapura Utara

Jayapura, 22 April 2025

Nomor : 000-1.5/4910/ser  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Yth. 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur  
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua  
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

di  
Jayapura

Menindaklanjuti surat Kepala BPSDA Nomor : 800.1/IBPSDA tanggal 8 Januari 2025, Perihal Usulan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan BLUD, maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025  
Pukul : 10.00 wib – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Lt 3, Kantor Gubernur Papua  
Agenda : Pembahasan Mekanisme Penerapan BLUD pada SKPD

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan :

SA. GUBERNUR PAPUA  
PA. SEKRETARIS DAERAH,  
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si  
PEMUDA UTAMA MADYA  
No. 197190728 199712 1 001



Rapat Sosialisasi Penerapan BLUD  
kepada SKPD teknis



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soe Sili, Dok II, Kantor Gubernur Papua, Jayapura Utara

Jayapura, 05 Mei 2025

Nomor : 000.15/4607/SET  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Perubahan Waktu Rapat

Yth. 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Papua  
2. Pjt. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua  
3. Inspektur Daerah Provinsi Papua  
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua  
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua  
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua  
7. Direktur Rumah sakit khusus Abepura

di

Jayapura

Sehubungan dengan Surat Nomor : 000.15/4210/SET tanggal 23 April 2025, Perihal undangan Rapat, maka rapat yang semula akan dilaksanakan pada hari kams, tanggal 24 April 2025 ditunda pelaksanaannya menjadi :

Hari/Tanggal : Jumat/ 23 Mei 2025  
Pukul : 10.00 wit – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Lt. 3, Kantor Gubernur Papua  
Agenda : Pembahasan Mekanisme Penerapan BLUD pada SKPD

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan :  
Pj. Gubernur Papua di Jayapura



Rapat Tahapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soa Sli, Dok II, Kantor Gubernur Papua, Jayapura Utara

Jayapura, 17-November 2025

Nomor : 000.15/13203/SD  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Lbr  
Hal : Sosialisasi Penerapan  
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Yth. Daftar Terlampir  
di  
Jayapura

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisiensi, transparan dan bertanggung-jawab, Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan selaku Pembina BLUD akan melakukan sosialisasi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 18 November 2025  
Pukul : 10.00 WIT – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Lt.3, kantor Gubernur Provinsi Papua

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan kepala SKPD agar dapat menugaskan sekretaris dan kepala UPTD untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Pih. SEKRETARIS DAERAH,

  
MB. SETYO WAHYUDI, SE., MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19660423 198709 1 001

Tembusan :  
1. Gubernur Papua di Jayapura.  
2. Wakil Gubernur Papua di Jayapura

Tabel 3.7

**Tabel 3.7**  
**Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan	Alternatif Solusi/Upaya yang Telah Dilakukan
1	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya 1 (satu) BUMD kategori sehat.</li> <li>2. Tidak terdapat Data Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD RSUD Jayapura</li> <li>3. SDM staf BLUD belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Koordinasi kepada RSUD Jayapura.</li> <li>2. Membentuk TIM Percepatan BUMD.</li> <li>3. Membentuk TIM Analisis Investasi Daerah.</li> <li>4. Penyusunan SOP Pembinaan dan Pengawasan BUMD.</li> <li>5. Mewajibkan Audit dari KAP.</li> <li>6. Laporan Keuangan diaudit Tepat Waktu.</li> <li>7. Metalogi Evaluasi yang Baku.</li> </ol>

#### 4) Sasaran 4 :

##### **Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu :

- a. Rapat dan Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota T.A 2025.
- b. Rapat dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan T.A 2025.
- c. Rapat dan Penyusunan Laporan Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua T.A 2025.
- d. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Tabel 3.8  
Sasaran 4

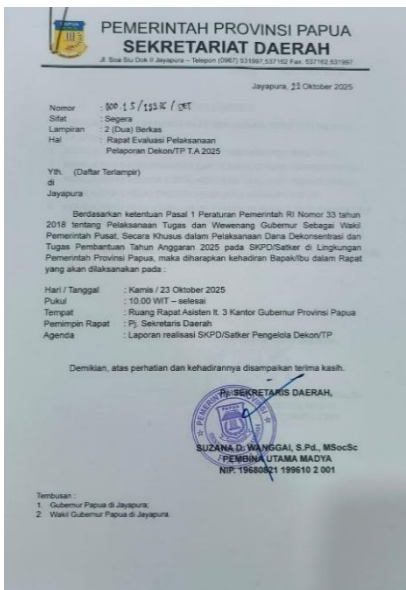
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Presentase	Kode
1	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	%	100%	100%	100%	100%	

Dokumentasi/ evidence :





## Dokumentasi Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dekon/TP T.A 2025



## Dokumentasi Rapat Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua T.A 2025

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Sate Sui Dole 11 Jayapura – Telepon (0897) 531987-531982 Faks. 531982-531987  
Jayapura, 31 Juli 2025

Nomor : 000.1.5/84c1/SFT  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (Dua) Eks  
Hal : Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua T.A. 2025

Yth. ( Daftar tertamper )  
Tempat

Bahwa dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Maka, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan daftar paket pekerjaan melalui keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/KEP/2022/2025 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua T.A. 2025. Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025  
Pukul : 11.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Lantai 3 Kantor Gubernur  
Agenda : Penyampaian informasi / Progres Pelaksanaan Pekerjaan oleh SKPD Pengumpul

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**  
**SUZANA D. SWANGGAL S.Pd., MSocSc**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 196808211996102001

Tembusan:  
Pj Gubernur Papua di Jayapura



## Dokumentasi Rapat Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua s/d bulan September T.A 2025



## Dokumentasi Rapat Pengendalian Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Provinsi Papua s/d bulan September T.A 2025



**Tabel 3.9**  
**Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi/Upaya yang Telah Dilakukan
1	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Presentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan dan Kualitas Data yang diberikan dari SKPD.</li> <li>2. Masih terdapatnya multi interpretasi antar SKPD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi antar SKPD dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.</li> <li>2. Perlu dilakukan Sosialisasi Tugas dan Fungsi SKPD secara khusus antara Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan BAPPERIDA.</li> </ol>

## B. Realisasi Anggaran

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 mengelola Pagu senilai Rp. 4.101.100.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.101.100.000,- atau 100%. Berikut realisasi anggaran akhir Tahun Anggaran 2025 pada setiap Program dan Kegiatan pada table 3.10 berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>986.659.231</b>	<b>98,67</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.600.000	104.600.000	100
2	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	37.000.000	37.000.000	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	758.933.000	746.307.631	98,34
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.760.000	98.751.600	99,99

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.589.634.436</b>	<b>99,35</b>
1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	800.000.000	798.292.612	99,79
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	800.000.000	791.341.824	98,92
<b>C</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.501.100.000</b>	<b>1.470.126.513</b>	<b>90,79</b>
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	812.453.900	810.727.947	99,79
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	688.646.100	659.398.566	95,75
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.101.100.000</b>	<b>4.046.420.180</b>	<b>98,67</b>



**Tabel 3.11**  
**Pelaksanaan Urusan Pilihan**  
**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025**

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi 31 Desember 2025					Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
		Target Output	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Output			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>986.613.885</b>	<b>98,66</b>				
<b>1</b>	<b>Pengendalian Administrasi Terintegrasi</b>								
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>104.600.000</b>	<b>104.600.000</b>	<b>100</b>				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		<b>104.600.000</b>	<b>104.600.000</b>	<b>100</b>				
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>100</b>				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>1</b>	<b>37.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>100</b>				
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>758.933.000</b>	<b>746.307.631</b>	<b>98,34</b>				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>1 Paket</b>	<b>113.598.365</b>	<b>110.318.365</b>	<b>97,11</b>				

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi 31 Desember 2025					Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
		Target Output	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Output			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	84.371.635	83.158.500	98,56				
	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	14.275.000	14.275.000	100				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	134.000.000	133.993.664	100				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	412.688.000	404.562.102	98,03				
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		98.760.000	98.706.254	99,95				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	90.000.000	90.000.000	100				

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi 31 Desember 2025					Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
		Target Output	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Output			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8.760.000	8.751.600	99,90				
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		1.600.000.000	1.589.634.436	99,35				
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan dan rekomendasi Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		800.000.000	798.292.612	99,79			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	8.000.000.000	798.292.612	99,79	7 Dokumen		
2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		8.000.000.000	791.341.824	98,92			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	8.000.000.000	791.341.824	98,92	1 Dokumen		
3	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, monitoring								

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi 31 Desember 2025					Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
		Target Output	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Output			
dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik									
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		<b>1.501.100.000</b>	<b>1.470.126.513</b>	<b>97,94</b>				
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah</b>		<b>812.453.900</b>	<b>810.727.947</b>	<b>99,79</b>				
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	<b>1 Dokumen</b>	<b>812.453.900</b>	<b>810.727.947</b>	<b>99,79</b>	<b>1 Dokumen</b>			
	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>688.646.100</b>	<b>659.398.566</b>	<b>95,75</b>				

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi 31 Desember 2025					Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekom DPRD
		Target Output	Pagu	Realisasi (Rp)	%	Output			
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen	189.690.000	188.401.480	99,32	1 Dokumen			
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	273.700.233	263.767.719	96,37	1 Dokumen			
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	225.255.867	207.229.367	92,00	1 Dokumen			



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025.

#### **A. Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 ini menyajikan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran teknis sesuai dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2025.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori 'sangat baik', dengan demikian capaian kinerja semua indikator perlu di dipertahankan di tahun yang akan datang.

#### **B. Saran**

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas ASN yang belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja dalam melaksanakan kegiatan.
2. Diperlukan pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan profesionalitas dalam rangka peningkatan kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu ASN dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan, hendaknya dapat terus disempurnakan atau disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan berbagai kegiatan di monitor dan di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
4. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
5. Perlu Upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang menggambarkan capaian kinerja untuk setiap sasaran Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua secara umum.



# LAMPIRAN

LKj Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
SETDA Provinsi Papua

# 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2025-2026

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 2024-2026

### SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kompleks Kantor Gubernur, Jalan. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua.  
Email : [bpaperkonsipapua24@gmail.com](mailto:bpaperkonsipapua24@gmail.com)

#### KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA NOMOR : 100.3.3.4/46/BPAP/24 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicators*) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang ...../2

-2-

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN ...../3

-3-

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Bahwa Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : April 2024

**PIL KETUA BIRO,**  
  
**DR. ANDRY, S.I.P., M.SI**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19740129 200012 1 002**

**Tembusan disampalkan kepada Ylh:**

1. Gubernur Papua ( sebagai laporan );
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsial Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran..... /4

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Pemanggang Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	<p>Formulasi:</p> $\left( \frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang perekonomian}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk kebijakan terdiri Peryub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Keja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Peraturan Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian Kebijakan Perencanaan	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
2	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah untuk pengeloaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkuerja baik	<p>Formulasi:</p> $\left( \frac{\text{Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik}}{\text{Total jumlah BUMD dan BLUD}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan memfasilitasi penguatan tatakelola yang baik BUMD dan BLUD melalui Pembinaan, monitoring dan evaluasi</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data BUMD dan BLUD
3	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	<p>Formulasi:</p> $\left( \frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang SDA}}{\text{Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang SDA}} \right) \times 100\%$ <p>Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti di daerah dalam bentuk : Perjub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Peraturan Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
4	Meningkatnya Pengendalian	Persentase rumusan kebijakan bidang	Formulasi:	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pengolahan Data Kebijakan dan

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Basaran / Hasil / Kinerja Utama administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	pembangunan yang menjadi kebijakan	$\left( \frac{\text{Jumlah Kebijakan}}{\text{Jumlah Rumusan Kebijakan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan : Untuk Kebijakan dimaksud diantaranya Pergub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>		Rumusan Kebijakan

Jayapura, April 2024  
 Ptt. Kepala Biro,  
  
 Dr. ANDRY, S. IP., M. SI  
 Pantina Til. I  
 NIP. 19740129 200012 1 002

## 2) Perjanjian Kinerja Kepala SKPDS Tahun 2025-2026



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Dr. ANDRY, S.IP., M.Si  
**Jabatan** : Pjt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama** : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si  
MAYJEN (Purn)  
**Jabatan** : Pj. GUBERNUR PAPUA


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,  
Pj. GUBERNUR PAPUA



RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si  
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA,  
Pjt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



Dr. ANDRY, S.IP., M.Si  
NIP. 19740125 200012 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu	Target
1	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian : 2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 800.000.000	100%
2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	Program Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam : 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 800.000.000	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	4. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
4	Meningkatnya Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan : 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 812.453.900 Rp 688.646.100	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 1.000.000.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.600.000.000
3	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 1.501.100.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 4.101.100.000</b>

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,  
**Pj. GUBERNUR PAPUA**



**RAMES LIMBONG, S.IP., M.Si**  
**MAYJEN (Purn)**

PIHAK PERTAMA,  
**Pt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



**Dr. ANDRI, S.IP., M.Si**  
**NIP. 19740129 200012 1 002**

### 3) Jenis Penghargaan yang diterima/ diperoleh SKPD di Tahun 2025

#### TPID AWARDS PERINGKAT 1 TPID PROVINSI BERKINERJA TERBAIK



2025

KANTOR GUBERNUR PAPUA



# LAPORAN KINERJA

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA

kompleks kantor gubernur papua  
Jl. Soa Siu Dok II, Jayapura, Lantai 3  
Surel : [bpaprovinciapapua24@gmail.com](mailto:bpaprovinciapapua24@gmail.com)  
Laman : <https://ekbangpapua.go.id>